

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :	06
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News	
Palangka Post	<input checked="" type="checkbox"/>	Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Pemkab Bartim Serahkan LKPD 2021 Tepat Waktu

TAMIANG LAYANG-Pemerintah Kabupaten Bartim menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu. Penyerahan secara langsung dilakukan Bupati Ampara AY Mebas kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Agus Priyono, Jumat (18/3).

Kepala BPKAD Kabupaten Bartim, Misnohartaku melalui Kabid Akuntansi Erawati menyampaikan, penyerahan LKPD tersebut untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 1/2004 tentang perbendaharaan Negara.

"Laporan keuangan disampaikan gubernur, bupati atau walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga



KOMITMEN: Bupati Ampara AY Mebas menyerahkan LKPD TA 2021 kepada BPK RI, di Palangka Raya.

sesuai estimasi Pemkab Bartim menyerahkan secara tepat waktu," ucap Era, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam penyampaian LKPD tersebut disertai dokumen pendukung. Antara lain, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Laporan Hasil

Review Inspektorat, Laporan Keuangan BUMD, Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemda dan Ikhtisar Laporan Dana Desa.

"Setelah penyerahan, BPK akan melakukan pemeriksaan LKPD dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan pada tahun anggaran 2021," sebut Era.

Sementara itu, Bupati Ampara AY Mebas mengungkapkan, atas penyampaian LKPD Tahun 2021 pihak pemerintah daerah optimistis masih bisa mempertahankan Opini WTP. Sebelumnya dalam menyusun LKPD, kepala daerah juga telah menginstruksikan kepada masing-masing perangkat daerah agar menyajikan laporan mengarah pada perbaikan.

"Kita mengharapkan WTP yang diterima lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya," pungkas bupati. (log)